

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tekad yang sangat kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Semua ini tidak terlepas dari isi yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang tertuang dalam alinea keempatnya terdapat kalimat yang begitu berharga, yakni "mencerdaskan kehidupan bangsa". Dalam kalimat ini tersemat tekad kuat untuk mengangkat derajat pendidikan masyarakatnya (Ammar, 2019). Pendidikan adalah hak yang tak terpisahkan dari setiap warga negara, yang diberikan oleh negara tanpa pandang bulu. Dalam lembaran undang-undang, tertuang peran negara yang menyatakan pendidikan ialah hak setiap warga negara (UUD 1945). Pendidikan memiliki lembaran-lembaran yang menguraikan standar-standar nasional pendidikan yang harus diikuti, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, serta standar penilaian pendidikan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Rubiyati & Ismanto, 2020).

Pemerintah memegang peran penting sebagai penjamin hak pendidikan setiap warga negara, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dan menciptakan kesejahteraan umum sesuai amanat Pasal 31 UUD 1945. Pentingnya pendidikan tak hanya sebatas konsep, tapi juga menjadi tolak ukur pertumbuhan suatu pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terus merancang berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, untuk membantu mengukir masa depan yang lebih cerah untuk masyarakat Indonesia (Sari, 2022). Biaya pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Peran penting ini mencakup pengaruhnya terhadap

efektivitas kegiatan pendidikan dalam mencapai tujuannya. Biaya pendidikan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan atau menghasilkan sesuatu. Dengan kata lain, ada empat elemen utama yang terkait dengan biaya pendidikan: pertama, ini melibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi; kedua, diukur dalam satuan mata uang; ketiga, biaya tersebut sudah terjadi atau berpotensi terjadi; dan keempat, pengorbanan tersebut dilakukan untuk tujuan tertentu (Ferdinand, 2011).

Program BOS merupakan inisiatif pendidikan berskala nasional yang melibatkan masyarakat secara cukup besar. Setiap siswa berhak atas dana yang disebut Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang digunakan sekolah untuk menutupi biaya operasional program pendidikannya. (Ningsih et al., 2022). Salah satu program pemerintah yang menunjukkan pentingnya dana operasional satuan pendidikan dasar dalam melaksanakan program wajib belajar adalah Bantuan Operasional Sekolah. Agar satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, maka standar biaya operasional nonpersonil adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional nonpersonil selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari total dana pendidikan., sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS, termasuk investasi dan personalia, yang dapat dibiayai melalui program Bantuan Operasional Sekolah (Yusra et al., 2021).

Pemerintah pada umumnya menyediakan dana BOS untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat. Bantuan diberikan oleh pemerintah agar sekolah dapat menggratiskan biaya sekolah bagi beberapa siswa yang kurang mampu atau mengurangi tagihan biaya sekolah, dan juga agar kualitas proses pembelajaran di sekolah meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Dana BOS adalah pengelolaan dana dan seluruh sumber daya yang

ada dalam program Dana BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS adalah pengelolaan yang baik dapat membantu mencapai tujuan program BOS secara efektif dan efisien. (Sjioen & Ludji, 2020). Dalam pengelolaan pendidikan, keuangan dan pembiayaan memiliki peran penting. Kedua komponen ini adalah pilar yang mendukung keefektivasan dalam mengelola sistem pendidikan. Untuk mencapai tujuan ini, manajemen keuangan harus dilakukan dengan cermat dengan mencakup berbagai tahapan, seperti perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat (Mulyasa, 2006)

Pengelolaan dana kependidikan yang baik mengikuti gagasan kesesuaian antara tindakan pengaturan keuangan dan pembiayaan pendidikan untuk memenuhi perencanaan pendidikan, yang dikenal dengan prinsip efektivitas. Kemampuan lembaga pendidikan dalam memenuhi tujuan pembelajaran yang ditetapkan secara berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan juga dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan keuangan pendidikannya. (Ismail & Sumaila, 2020). Ravianto (2014) menyebutkan Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu tugas dapat diselesaikan sesuai rencana, dari segi waktu, biaya dan mutu maka dapat disebut efektif. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika efektivitas sesuai dengan proses perencanaan, maka proses akan berjalan lancar dan efektif dalam pekerjaannya.

Pada beberapa kasus yang menarik perhatian, terdapat beberapa sekolah penerima Dana BOS yang mampu menggratiskan pendidikan bagi siswa tanpa melakukan pemungutan sama sekali. Salah satunya ialah Sekolah Dasar Negeri1 Toloa Kota Tidore Kepulauan. Sekolah penerima dana BOS ini tidak ada pembebanan biaya terhadap seluruh siswa. Sekolah ini merupakan salah satu contoh yang berhasil memanfaatkan dana BOS dengan efisien dan efektif. Meskipun menerima kuota porsi dana BOS yang sama dengan

sekolah lainnya, mereka berhasil mengelola dana tersebut dengan baik, sehingga tidak ada beban yang diberikan kepada siswa dan orangtua.

Penelitian lebih lanjut tentang fenomena ini akan sangat menarik, karena menggambarkan kemampuan sekolah tersebut dalam mengelola dana BOS dengan efektif sehingga mampu meniadakan beban biaya pendidikan bagi siswa dan orangtua. Maka, dalam konteks latar belakang yang unik ini, penelitian skripsi ini bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam fenomena yang terjadi di SDN 1 Toloa dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penggratisan pendidikan tanpa pungutan di sekolah penerima dana BOS. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mendalam untuk pembuatan kebijakan pendidikan., perbaikan mutu pendidikan, dan pengayaan pemahaman kita tentang pendidikan inklusif dan merata.

Adapun beberapa rujukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian Aklima (2020) dimana menunjukkan bahwa MIN 3 Banda Aceh mengelola Dana BOS sesuai petunjuk teknis Dana BOS dengan menunjuk kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah sebagai perantara antara sekolah dan orang tua siswa. Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Tika Dwi Wahyuningsih (2016), dimana pihak sekolah mengumumkan rencana penggunaan dan realisasi penggunaan Dana BOS kepada seluruh warga sekolah dalam rapat , hal ini menunjukkan bahwa prosedur pengelolaannya sudah memadai. Wulan (2021) melakukan penelitian berikutnya, dimana pengelolaan dana BOS di SDN 014746 Kwala Sikasm berjalan dengan baik.Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019, pertanggungjawaban dana BOS dilakukan setiap triwulan. Namun, transparansi belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari kurangnya papan informasi mengenai penggunaan dana BOS yang sebenarnya. Sedangkan Nurhayati (2022), dimana Alokasi anggarannya mengacu pada subanggaran yang terdiri atas belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai. Perencanaan penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019

di UPTD SD 84 Parepare telah sesuai dengan petunjuk teknis. Uraian alokasi pengelolaan dana BOS dinilai sudah sesuai dengan ketentuan teknis. Pemanfaatan dana biaya operasional sekolah pada tahun 2019 telah memenuhi kebutuhan bahan pertimbangan penyaluran dana BOS yang disalurkan melalui empat tahap penyaluran anggaran. Sedangkan untuk pengadministrasian Dana Biaya Operasional Sekolah telah selesai dilakukan kajian pengelolaan keuangan syariah terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan yang dimiliki ketiga sub-anggaran tersebut

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan efektivitas pengelolaan dana BOS yang berhasil menggratiskan biaya Pendidikan terhadap seluruh siswa di SDN 1, dengan judul “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BOS (Studi kasus pada SDN 1 Toloa Kota Tidore Kepulauan)”

1.2 Motivasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka motivasi penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana BOS di SDN 1 Toloa yang berhasil menggratiskan Pendidikan biaya bagi seluruh siswa

1.3 Fokus Penelitian

Mengetahui dan menggali bagaimana efektivitas pengelolaan Dana BOS bagi SDN 1 Toloa

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh SDN 1 Toloa Kota Tidore Kepulauan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai bidang ilmu akuntansi khususnya pada bidang kajian akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan kinerja keuangan pada suatu instansi atau lembaga pemerintah, serta dapat memperkaya ilmu ekonomi khususnya pada bidang akuntansi.

1.5.2 Kontribusi Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana bagi peneliti untuk menerapkan teori, memperluas wawasan tentang efektivitas pengelolaan dana BOS. Dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Negeri Khairun Ternate.

2. Bagi SDN 1 Toloa Kota Tidore Kepulauan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan standar pendidikan, khususnya memberi masukan dalam penerapan prinsip efektivitas pengelolaan keuangan dana BOS dimasa yang akan datang.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mengerjakan topik terkait, serta sebagai bahan pustaka dan wacana ilmiah untuk menambah pengetahuan akuntansi.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang dampak positif dari Pendidikan gratis yang diwujudkan melalui Dana BOS. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan Lembaga pemerintah untuk melanjutkan atau memperluas program ini.

1.5.3 Kontribusi Kebijakan

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pemahaman kita mengenai efektivitas pengelolaan dana BOS dan menjadi sumber untuk penelitian di masa depan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dari penelitian ini sehingga mereka dapat menilai wajar atau tidaknya pengelolaan uang BOS dan sesuai dengan petunjuk teknis BOS pemerintah.

